

**PENGARUH AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UPT SAMSAT
LUBUK PAKAM**

TUGAS AKHIR

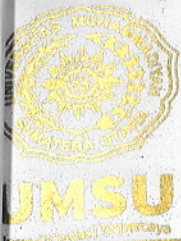
*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



OLEH:

NAMA : NAZWA SHAYRA ANATAYA
NPM : 2205170152
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2026 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NAZWA SHAYRA ANATAYA
NPM : 2205170152
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Assoc. Prof. Dr. IRFAN, SE., MM

Penguji II

ISNA ARDILA, SE., M.Si

Pembimbing

MASTA SEMBIRING, S.E., M.Ak

Panitia Ujian

Ketua

Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : NAZWA SHAYRA ANATAYA
N.P.M : 2205170152
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir

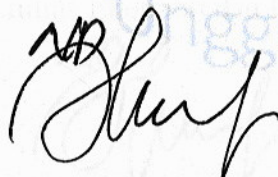


MASTA SEMBIRING, S.E., M.Ak.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



NABILA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc.

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. RADIMAN, S.E., M.Si.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nazwa Shayra Anataya
NPM : 2205170152
Dosen Pembimbing : Masta Sembiring, S.E., M.Ak.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang masalah	27/2 /2026	
Bab 2	Tambahan jurnal teori	27/2 /2026	
Bab 3	Perbaiki instrumen data.	27/2 /2026	
Bab 4	Tambahkan lagi hasil uji validitas	2/4 /2026	
Bab 5	OK !	2/4 /2026	
Daftar Pustaka	Up date Referensi	2/4 /2026	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sedang	6/4 /2026	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.

Medan, 06 April 2026
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Masta Sembiring, S.E., M.Ak.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nazwa Shayra Anataya

NPM : 2205170152

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul “ **Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Lubuk Pakam**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Nazwa Shayra Anataya

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

NAZWA SHAYRA ANATAYA

NPM : 2205170152

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : nazwashayraanata@gmail.com

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam dengan populasi sebanyak 119.753 wajib pajak dan ampel sebanyak 100 orang yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Akuntabilitas Administrasi Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, E-SAMSAT, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX ADMINISTRATION ACCOUNTABILITY AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE AT UPT SAMSAT LUBUK PAKAM

NAZWA SHAYRA ANATAYA

NPM : 2205170152

Faculty of Economics and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : nazwashayraanata@gmail.com

This study aims to determine and analyze the effect of Tax Administration Accountability and Accounting Information Systems on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at UPT SAMSAT Lubuk Pakam. This research employs a causal associative approach to examine the relationships among variables. The data used in this study are quantitative, analyzed through numerical calculations and interpreted to draw conclusions. The object of this study is UPT SAMSAT Lubuk Pakam, with a population of 119,753 taxpayers and a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling based on Partial Least Square (SEM-PLS) method with the assistance of SmartPLS software. The results indicate that Tax Administration Accountability has a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Accounting Information Systems also have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Administration Accountability, Accounting Information System, E-SAMSAT, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. atas limpah rahmat dan hidayahnya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas akhir ini berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Lubuk Pakam”**.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, mulai dari tahap awal hingga selesainya penulisan, penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada ayah dan bunda tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, serta dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan ketulusan yang selalu diberikan demi masa

depan penulis. Dalam setiap langkah dan proses yang dilalui, doa serta semangat dari ayah dan bunda menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus bertahan dan berjuang.

2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Mhd. Shareza Hafiz., S.E, M.Acc.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, SE., M.Sc.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **M. Firza Alpi, SE., M.,Si.** selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Masta Sembiring, SE., M.Ak.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Tugas akhir ini.
9. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Seluruh Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.

11. Kepada kakak penulis, Varo Aurelia, adik penulis, Varel Lefrand Dimitri, serta seluruh keluarga besar, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Kehadiran, kasih sayang, dan kebersamaan keluarga menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan dengan baik.
12. Sahabat terbaik penulis, Risa Fathaniah. Terima kasih telah menemani penulis sejak awal masa perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, sedih dan diskusi larut malam yang menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Penulis merasa sangat bersyukur telah dipertemukan dengan seseorang yang bisa menjadi sahabat dan kakak dalam satu waktu, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam berbagai keadaan. Kehadirannya menjadi salah satu alasan penulis dapat melalui proses penyusunan tugas akhir ini dengan lebih kuat dan penuh motivasi.
13. Kepada Hanis, Elsa, Didil, serta teman-teman KKN penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, semangat, serta kenangan indah yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan pengalaman berharga dalam perjalanan perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Kehadiran kalian memberikan warna, motivasi, dan semangat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

14. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Nazwa Shayra Anataya. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan dan air mata, terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

Medan, April 2026

Penulis

NAZWA SHAYRA ANATAYA
2205170152

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i>	15
2.1.2 Pajak kendaraan Bermotor	16
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.1.4 Akuntabilitas Administrasi Perpajakan	24
2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan Terhadap	34
Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.3.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan	36
Wajib Pajak	36
2.4 Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian	39
3.2 Definisi Operasional	39

3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.3.1	Tempat Penelitian.....	40
3.3.2	Waktu Penelitian.....	41
3.4	Populasi dan Sampel.....	41
3.4.1	Populasi.....	41
3.4.2	Sampel.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5.1	Data Primer.....	43
3.5.2	Data Sekunder.....	43
3.6	Uji Instrumen Data.....	44
3.7	Teknik Analisis Data.....	48
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	48
3.7.2	Analisis SEM (Structural Equation Modeling).....	49
3.7.3	Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model).....	50
3.7.4	Evaluasi model structural (Inner Model).....	52
3.8	Uji Hipotesis.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		54
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	54
4.1.1	Deskripsi Kuesioner Penelitian.....	54
4.1.2	Karakteristik Responden.....	54
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.2.1	Variabel Akuntabilitas Admimistasi Perpajakan.....	56
4.2.2	Variabel Sistem Informasi Akuntansi.....	57
4.2.3	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
4.3	Analisis Data.....	60
4.3.1	Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	60
4.3.2	Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	66
4.3.3	Uji Hipotesis.....	68
4.4	Pembahasan.....	69
4.4.1	Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	69

4.4.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2020-2025	3
Tabel 1.2 Data Penggunaan E-SAMSAT di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	39
Tabel 3.2 Rencana Penelitian	41
Tabel 3.3 Skala Likert.....	43
Tabel 3.4 Uji Validitas	45
Tabel 3.5 Uji reliabilitas	47
Tabel 4.1 Jenis Kelamin responden.....	54
Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia.....	55
Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.....	55
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif variabel akuntabilitas administrasi perpajakan	57
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif variabel sistem informasi akuntansi.....	58
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak.....	59
Tabel 4.7 Nilai outer loading.....	61
Tabel 4.8 Nilai <i>Average variance extracted</i>	62
Tabel 4.9 <i>Discriminant validity</i>	63
Tabel 4.10 Nilai <i>composite reliability</i>	65
Tabel 4.11 Nilai <i>R-Square</i> (R^2)	67
Tabel 4.12 Nilai <i>F-Square</i> (F^2).....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 3.1 Model Struktural PLS	50
Gambar 4.1 <i>Standardized Loading Factor</i>	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Ketersediaan layanan publik yang optimal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal yang baik memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial (Magadhendra et al., 2024).

Dalam kebijakan fiskal, pajak merupakan merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan paling besar dan krusial dalam menopang perekonomian nasional. Penerimaan dari sektor pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kepentingan publik, antara lain pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial (Dahrani & Tyasti, 2024).

Sebagai cerminan dari peran strategis pajak tersebut, kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan terus menunjukkan dominasi dalam struktur pendapatan negara. Pada tahun 2024, pendapatan negara mencapai Rp 2.842,5 triliun, di mana 82,4% berasal dari penerimaan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2025). Peran strategis ini tidak hanya terbatas pada tingkat pusat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat

penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah (Rahmawati & Sutrisno, 2020).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Waluyo (2021), Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak daerah yang memiliki basis pajak luas dan stabil, karena kepemilikan kendaraan bermotor cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan PKB berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkesinambungan.

Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak secara otomatis mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Dalam praktiknya, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang besar sering kali belum dapat direalisasikan secara maksimal akibat masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu atau sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah objek pajak perlu diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik agar penerimaan PKB dapat optimal (Ningsih et al., 2025).

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Hanum & Mulyawan, 2024). Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Khopipah, 2023).

Untuk menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara nyata, berikut disajikan data mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Bayar	Persentase Kepatuhan	Tingkat Pertumbuhan
2020	113.209	98.419	86.94%	0
2021	111.010	97.800	88.10%	-0,20%
2022	113.115	96.791	85.57%	-0,85%
2023	114.533	92.185	80.49%	-4,36%
2024	119.753	92.930	77.60%	-5,69%

Sumber : UPT SAMSAT Lubuk Pakam (2025)

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam mengalami penurunan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan kepatuhan tercatat sebesar -0,20% dan mencapai penurunan sebesar -5,69% pada

tahun 2024. Penurunan pertumbuhan kepatuhan ini terjadi secara progresif dan semakin tajam dari tahun ke tahun, sehingga persentase kepatuhan yang semula berada di angka 86,94% pada tahun 2020 merosot hingga 77,60% pada tahun 2024. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat jumlah wajib pajak terdaftar justru terus bertambah dari 113.209 orang pada tahun 2020 menjadi 119.753 orang pada tahun 2024, namun tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas administrasi perpajakan. Akuntabilitas administrasi perpajakan merujuk pada kemampuan dan tanggung jawab lembaga perpajakan dalam menyelenggarakan sistem administrasi pajak secara transparan, menyediakan akses informasi yang jelas, serta mempertanggungjawabkan setiap proses pengelolaan pajak kepada publik. Akuntabilitas ini tercermin dalam kejelasan prosedur administrasi, keterbukaan informasi perpajakan, serta keandalan sistem dalam memastikan bahwa pengelolaan pajak dilakukan secara tepat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Administrasi perpajakan yang akuntabel diyakini mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh (Putri & Lia, 2025).

Salah satu persoalan mendasar yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan atas nama orang lain. Secara normatif, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor baik secara langsung maupun melalui perwakilan mensyaratkan KTP asli pemilik kendaraan sebagai

dokumen wajib yang harus dibawa ke loket pelayanan (BAPENDA Sumut, 2021; Perpol No. 7 Tahun 2021). Namun dalam praktik layanan digital seperti e-SAMSAT, proses pembayaran hanya memerlukan NIK dan nomor kendaraan tanpa disertai verifikasi fisik identitas pemilik secara langsung. Kondisi ini membuka celah di mana siapa pun yang mengetahui data kendaraan dapat melakukan pembayaran pajak atas nama pemilik lain tanpa surat kuasa yang terverifikasi oleh sistem, sehingga tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Kondisi ini berbeda dengan sistem SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah menerapkan mekanisme verifikasi identitas lebih ketat melalui pencocokan wajah (*face matching*) dengan data e-KTP dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga setiap transaksi hanya dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan yang sah (Polri & Kemendagri, 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi perpajakan yang tidak dilengkapi mekanisme verifikasi identitas yang memadai akan menciptakan celah akuntabilitas yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap keseluruhan sistem administrasi perpajakan.

Selain inovasi dalam penyederhanaan persyaratan administrasi, beberapa daerah juga mulai meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyesuaian waktu operasional Samsat. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa unit layanan Samsat yang beroperasi hingga hari Minggu pada program tertentu. Sementara itu, UPT Samsat Lubuk Pakam pada umumnya melayani masyarakat hingga hari Sabtu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu pelayanan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam meningkatkan

kemudahan akses, kualitas pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Lubis & Sukoco (2021) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang efisien dan peningkatan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selaras dengan itu, Erna Listyaningsih (2024) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas sistem administrasi dan kualitas pelayanan mencerminkan tingkat akuntabilitas administrasi perpajakan, yang pada akhirnya berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain akuntabilitas administrasi perpajakan, perkembangan teknologi informasi juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut Indah Ayu Rizky & Novien Rialdy (2025) Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam konteks perpajakan merupakan seperangkat prosedur, mekanisme, dan teknologi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyajikan data serta informasi akuntansi yang akurat terkait kewajiban perpajakan.

Penerapan sistem informasi akuntansi yang berkualitas dapat menghasilkan informasi perpajakan yang tepat dan efisien, memudahkan wajib pajak dalam

memahami kewajiban perpajakan mereka, serta meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi pajak. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan, karena wajib pajak memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak mereka (Utami & Estiningrum, 2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Utami & Estiningrum (2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang andal, mudah digunakan, dan menghasilkan informasi yang akurat dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka mengatasi permasalahan rendahnya efisiensi pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi informasi berupa E-SAMSAT sebagai bagian dari Sistem Informasi Akuntansi perpajakan. E-SAMSAT merupakan layanan elektronik untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dikembangkan sebagai bentuk inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Implementasi E-SAMSAT dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan, mempercepat proses pembayaran, serta mengurangi hambatan administratif yang sering ditemui dalam sistem pelayanan konvensional, seperti antrean panjang dan waktu pelayanan yang relatif lama.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Zubaidah & Fitri Lubis, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan dan penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna

terhadap kemudahan dan keamanan sistem (Isna Ardila et al., 2025). Dalam konteks administrasi perpajakan daerah, kondisi tersebut menjadi penting karena efektivitas sistem informasi akuntansi dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Meskipun Sistem Informasi Akuntansi di UPT SAMSAT Lubuk Pakam mencakup berbagai subsistem yang kompleks, seperti pendaftaran kendaraan, pelaporan, dan pengarsipan dokumen, penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada Sistem Informasi Akuntansi yang berkaitan dengan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu melalui penerapan E-SAMSAT.

Untuk memahami perkembangan adopsi E-SAMSAT di UPT SAMSAT Lubuk Pakam, berikut disajikan data tentang tingkat penggunaan platform E-SAMSAT dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor selama periode 2020-2024:

Tabel 1.2 Data Penggunaan E-SAMSAT di UPT SAMSAT Lubuk Pakam

Tahun	Wajib Pajak Yang Bayar	Penggunaan E-SAMSAT	Persentase
2020	98.419	40	0.04%
2021	97.800	17	0.02%
2022	96.791	589	0.61%
2023	92.185	1.683	1.83%
2024	92.930	2.559	2.75%

Sumber : UPT SAMSAT Lubuk Pakam (2025)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tingkat penggunaan layanan E-SAMSAT oleh wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam masih tergolong sangat rendah. Meskipun jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun tergolong tinggi, persentase penggunaan E-SAMSAT hanya berada pada kisaran 0,04% hingga 2,75% selama periode 2020–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak

belum memanfaatkan layanan E-SAMSAT dan masih menggunakan alternatif metode pembayaran pajak selain sistem tersebut.

Meskipun E-SAMSAT memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan akses dan layanan online, masih terdapat tantangan teknis dan sosial seperti infrastruktur teknologi dan kesadaran masyarakat yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasinya (Enggaryanti, 2024)

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) saja tidak cukup jika tidak didukung oleh akuntabilitas administrasi yang baik. Rendahnya adopsi E-SAMSAT (hanya 2,75%) mencerminkan rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Jika wajib pajak tidak percaya pada transparansi dan keandalan sistem administrasi, mereka akan enggan menggunakan E-SAMSAT meskipun teknologinya tersedia.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh akuntabilitas administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil yang beragam. Damanik (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena administrasi yang akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sejalan dengan itu, Supriatiningsih et al. (2023) juga menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan yang tertata dan dapat dipertanggungjawabkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh akuntabilitas administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Ramadhian & Maryono (2025) menemukan bahwa akuntabilitas perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun variabel lain seperti kesadaran dan pelayanan fiskus berpengaruh positif. Selain itu, penelitian oleh Machfiroh dan Mutholib (2022) menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa aspek administrasi tertentu mungkin tidak cukup mendorong perilaku patuh WP dalam konteks tertentu.

Demikian pula pada variabel Sistem Informasi Akuntansi, hasil penelitian juga menunjukkan inkonsistensi. Utami & Estiningrum (2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang andal dan mudah digunakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nisa & Saepuloh (2025) juga menemukan bahwa penerapan program E-SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena memberikan kemudahan akses dan efisiensi pembayaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi elektronik dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Agista et al. (2022) menemukan bahwa variabel program E-Samsat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Subang. Penelitian oleh Ardani & Kurniawati (2024) menyimpulkan bahwa program E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor di Wonogiri, meskipun kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan terbukti berpengaruh positif.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas administrasi perpajakan dan sistem informasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan E-SAMSAT di tingkat daerah. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak meneliti pengaruh sistem informasi atau kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang mengkaji keterkaitan antara akuntabilitas administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi secara bersama, khususnya dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-SAMSAT di tingkat daerah, masih terbatas.

Padahal, akuntabilitas administrasi perpajakan berperan penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem, sementara Sistem Informasi Akuntansi berfungsi sebagai sarana pendukung yang mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakseimbangan antara kualitas sistem dan akuntabilitas administrasi berpotensi menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan digital serta menurunnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris pengaruh akuntabilitas administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat**

Lubuk Pakam” diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan optimalisasi penerapan E-SAMSAT.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam mengalami pertumbuhan negatif dari $-0,20\%$ hingga $-5,69\%$ selama periode 2020–2024, yang menyebabkan penurunan persentase kepatuhan dari $86,94\%$ menjadi $77,60\%$ meskipun jumlah wajib pajak meningkat.
2. Akuntabilitas administrasi perpajakan dalam pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Lubuk Pakam belum optimal dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas penerapan layanan E-SAMSAT sebagai bagian dari Sistem Informasi Akuntansi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam selama periode 2020–2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengembangan kajian di bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait pengaruh akuntabilitas

administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi UPT SAMSAT Lubuk Pakam dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas administrasi perpajakan serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan konsep akuntabilitas administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991), perilaku aktual (*actual behavior*) seseorang dipengaruhi oleh niat atau intensi (*behavioral intention*) untuk melakukan perilaku tersebut. Niat perilaku ini dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Maka dari itu, *Theory Of Planned Behavior* dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat (*intention*). Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas administrasi perpajakan dan sistem informasi akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Akuntabilitas yang baik membentuk sikap positif wajib pajak, sedangkan sistem informasi berkualitas, seperti E-SAMSAT, meningkatkan persepsi kontrol perilaku, sehingga keduanya mendorong kepatuhan pajak. Kemudahan akses dan kejelasan informasi membuat wajib pajak merasa lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana faktor eksternal seperti akuntabilitas administrasi dan sistem informasi dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Pajak kendaraan Bermotor

2.1.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Hafsah & Dini Aprilia Pratiwi, 2022). Secara hukum, pengertian ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menyatakan bahwa PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dimana objek pajaknya meliputi semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh mesin dan digunakan di jalan darat. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa PKB adalah pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

PKB merupakan kontribusi wajib dari pemilik atau pengendali kendaraan bermotor kepada pemerintah daerah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Pemungutan PKB dilakukan oleh kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja (Persero).

2.1.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah nilai yang dijadikan acuan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (DJPK, 2018). Dasar pengenaan ini dihitung sebagai perkalian antara dua unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan data akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
2. Bobot kendaraan koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2.1.2.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan besaran persentase yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penetapan batas bawah dan batas atas tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2%, sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (UU HKPD No. 1 Tahun 2022). Meskipun ambang batas tarif telah ditentukan secara nasional, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif spesifik melalui Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Tarif pajak kendaraan bermotor tidak hanya menjadi alat perhitungan pajak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengatur kepemilikan kendaraan. Besaran tarif PKB dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: jenis kendaraan (pribadi, komersial, kendaraan dinas, atau kendaraan khusus), tahun pembuatan kendaraan, kapasitas mesin, dan tujuan penggunaan kendaraan.

2.1.2.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah hal yang dikenakan pajak oleh pemerintah daerah, yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak dan digunakan di jalan serta wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih, yang digerakkan oleh mesin dan digunakan di jalan, termasuk sebagai objek PKB (DJPK, 2018).

2.1.2.5 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah pihak yang menjadi penanggung jawab atas kewajiban perpajakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam konteks PKB, subjek pajak dirumuskan sebagai orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, termasuk warga atau perusahaan yang tercatat sebagai pemilik atau pengendali kendaraan tersebut. Penelitian yang meneliti pajak kendaraan bermotor menyebutkan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor tidak hanya menjadi wajib pajak dalam arti administratif, tetapi juga menjadi fokus kajian perilaku wajib pajak karena kepemilikan atau penguasaan kendaraan merupakan dasar timbulnya kewajiban membayar PKB kepada pemerintah daerah (Isnaini Husna, 2022). Subjek pajak mengacu pada entitas yang secara langsung terikat dengan objek pajak, yaitu kendaraan bermotor yang mereka miliki atau kuasai.

2.1.2.6 Manfaat Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki manfaat utama sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pemeliharaan infrastruktur, layanan publik, dan kegiatan sosial. Pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan. PKB membantu pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Benedick et al., 2024).

Selain fungsi fiskal, PKB memiliki fungsi regulatif dan lingkungan. Pajak ini dapat mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan karakteristik kendaraan yang dimiliki, seperti usia dan kapasitas mesin, sehingga secara tidak langsung PKB membantu mengendalikan jumlah kendaraan di jalan, mengurangi polusi, dan mendorong kesadaran warga terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, PKB bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien (Benedick et al., 2024)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa paksaan eksternal, meliputi pelaporan, pembayaran, dan pelaksanaan administrasi perpajakan secara tepat waktu dan benar. Dalam sistem perpajakan modern, kepatuhan bukan sekadar keterpaksaan hukum, melainkan mencerminkan

kesiapan dan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi ketentuan fiskal sebagaimana diatur dalam peraturan pajak yang berlaku di Indonesia (Murni Sulistyowati, 2024).

Heliani (2023) menegaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti sikap, pengetahuan, dan persepsi individu, serta faktor eksternal seperti pengawasan dan kebijakan fiskus. Pemahaman ini selaras dengan *Theory Of Planned Behavior (TPB)*, yang menekankan bahwa perilaku seseorang termasuk kepatuhan pajak merupakan hasil niat yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Berdasarkan penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan PKB merupakan bentuk konkret dari kepatuhan pajak, yaitu ketika wajib pajak mendaftarkan kendaraan dan membayar pajak tepat waktu serta benar.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam literatur perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipahami sebagai satu tindakan keseluruhan, tetapi juga dapat dipilah menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk pemenuhan kewajiban pajak. Menurut Rahayu dalam Supriyati (2022), jenis kepatuhan Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal menggambarkan ketaatan wajib pajak terhadap persyaratan administratif dalam sistem perpajakan. Ini mencakup tindakan-tindakan seperti pendaftaran NPWP, pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum batas waktu, penyampaian dokumen perpajakan sesuai format yang ditentukan,

dan pelaporan data yang lengkap. Kepatuhan formal terutama berfokus pada aspek waktu dan prosedur pelaporan pajak, tanpa memeriksa apakah perhitungan pajak itu sendiri sudah benar secara substansial.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material melibatkan kepatuhan terhadap inti substansi kewajiban perpajakan itu sendiri, yaitu perhitungan jumlah pajak yang benar dan pelaporan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Wajib pajak dikatakan patuh secara material jika perhitungan pajak yang dilaporkan akurat, lengkap, dan mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya, bukan hanya memenuhi prosedur administratif. Ini berarti wajib pajak tidak hanya menyerahkan laporan tepat waktu, tetapi juga menghitung dan membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan perpajakan

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih sukarela.

2. Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan

Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih sukarela.

3. Sanksi Perpajakan

Adanya sanksi administratif maupun pidana mendorong wajib pajak untuk

patuh, karena pemahaman terhadap konsekuensi ketidakpatuhan memberikan efek pencegahan.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak yang menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara akan cenderung membayar pajak secara sukarela tanpa dorongan eksternal.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ketersediaan sistem berbasis teknologi seperti E-SAMSAT memberikan kemudahan akses pembayaran pajak, sehingga meningkatkan persepsi kemudahan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian Damanik (2021), indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

1. Kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu

Menunjukkan kesediaan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan

Menggambarkan ketaatan wajib pajak dalam melengkapi persyaratan administrasi pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

Menunjukkan perilaku wajib pajak dalam menaati aturan perpajakan yang berlaku, termasuk besaran pajak dan sanksi yang ditetapkan.

4. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

Menggambarkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa paksaan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

5. Ketepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak

Menunjukkan konsistensi wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan memastikan

Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Safitri & Prasetyo (2022), indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meliputi:

1. Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu
Menunjukkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan
Menggambarkan ketaatan wajib pajak dalam melengkapi dan mematuhi prosedur administrasi perpajakan kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan
Menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan, tarif, serta sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku.
4. Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak
Menunjukkan dorongan internal wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

2.1.4 Akuntabilitas Administrasi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Administrasi Perpajakan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan bahwa setiap pihak yang diberikan wewenang harus siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Mais et al., 2024).

Administrasi perpajakan adalah proses atau sistem pengelolaan pajak yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perpajakan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Supriatiningsih et al., 2023). Berdasarkan konsep tersebut, akuntabilitas dalam administrasi perpajakan dapat dimaknai sebagai seluruh proses administrasi perpajakan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas administrasi perpajakan tercermin melalui transparansi prosedur, kejelasan informasi, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan, mulai dari tahap pelayanan hingga pengawasan dan penagihan pajak.

Administrasi perpajakan yang akuntabel diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang tertib, adil, dan transparan, sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara optimal oleh wajib pajak (Supriatiningsih et al., 2023). Akuntabilitas administrasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses perpajakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

akan menumbuhkan kepercayaan serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.4.2 Prinsip Akuntabilitas Administrasi Perpajakan

Menurut Intan Novita Sari et al. (2025), akuntabilitas dalam administrasi perpajakan tercermin melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang menunjukkan sejauh mana proses pelayanan dan pengelolaan pajak dapat dilaksanakan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai kualitas administrasi perpajakan, khususnya dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas administrasi perpajakan yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi perpajakan, baik terkait prosedur, persyaratan, maupun biaya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.
2. **Kejelasan dan kepastian prosedur**, yaitu adanya aturan dan alur pelayanan administrasi pajak yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.
3. **Ketepatan dan tanggung jawab dalam pelayanan**, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan administrasi perpajakan

2.1.4.3 Indikator Akuntabilitas Administrasi Perpajakan

Berdasarkan penelitian Damanik (2021), indikator akuntabilitas administrasi perpajakan meliputi:

1. **Transparansi administrasi perpajakan**
Keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya perpajakan sehingga mudah dipahami oleh wajib pajak.

2. Kejelasan dan kepastian prosedur
Adanya aturan dan alur pelayanan perpajakan yang jelas, konsisten, dan tidak berbelit-belit.
3. Tanggung jawab aparatur pajak
Kesungguhan dan profesionalitas petugas pajak dalam memberikan pelayanan serta menyelesaikan permasalahan perpajakan.
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi pajak
Setiap proses administrasi pajak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari segi waktu maupun ketepatan administrasi.

Selain itu, penelitian oleh Supriatiningsih (2023) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas administrasi perpajakan meliputi:

1. Transparansi informasi perpajakan
Menunjukkan keterbukaan informasi perpajakan yang disampaikan kepada wajib pajak secara jelas dan mudah dipahami.
2. Kejelasan prosedur pelayanan
Menggambarkan adanya prosedur pelayanan perpajakan yang jelas, terstruktur, dan tidak berbelit-belit.
3. Ketepatan dan keakuratan pelayanan
Menunjukkan kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kemudahan akses layanan perpajakan
Menggambarkan kemudahan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan, baik secara langsung maupun melalui sistem berbasis teknologi. Indikator tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas administrasi

tercermin dari kemampuan instansi perpajakan dalam memberikan layanan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada wajib pajak.

2.1.5 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.5.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. SIA merupakan kombinasi dari manusia, prosedur, data, dan teknologi yang dirancang untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang relevan dan andal (Romney & Steinbart, 2021).

Menurut Hidayatussa'adah (2025), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem terintegrasi yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data keuangan untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Menurut Wahyudi (2021) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang menyajikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu guna mendukung pengendalian dan keputusan manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa SIA adalah suatu sistem yang memadukan manusia, prosedur, data, dan teknologi untuk mengolah data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks administrasi perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor, SIA berperan penting untuk memastikan data wajib pajak seperti nomor kendaraan, nilai pajak, dan riwayat pembayaran diolah secara sistematis. Hal ini mencegah kesalahan manual dan mendukung transparansi, seperti yang ditekankan

dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2.1.5.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2021), Sistem Informasi Akuntansi memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan secara sistematis agar menghasilkan informasi yang akurat dan relevan.
2. Menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Mendukung pengendalian internal, sehingga dapat mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan data keuangan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui prosedur pencatatan dan pelaporan yang terstruktur.
5. Meningkatkan akuntabilitas, karena setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

2.1.5.3 E-SAMSAT Sebagai Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Rindiyan & Faisol (2023), E-SAMSAT adalah sistem layanan berbasis elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor SAMSAT dan dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah dan efisien. Menurut Nuraini & Furqon (2023), E-SAMSAT merupakan inovasi pelayanan publik di bidang perpajakan daerah yang memanfaatkan teknologi

informasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, E-SAMSAT dapat disimpulkan sebagai sistem pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik. Menurut Rindiyan & Faisol (2023), E-SAMSAT dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam administrasi perpajakan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa karakteristik utama yang menunjukkan peran E-SAMSAT dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pertama, E-SAMSAT mendukung automasi proses pembayaran pajak, di mana wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB secara online tanpa harus datang langsung ke kantor SAMSAT. Kondisi ini menghasilkan proses administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Kedua, E-SAMSAT berperan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi perpajakan, karena wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Hal ini mencerminkan fungsi SIA dalam memfasilitasi pengumpulan dan pengolahan data pajak secara cepat dan tepat.

Ketiga, sistem E-SAMSAT mampu menyajikan informasi yang cepat dan akurat, khususnya terkait status pembayaran dan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor secara real-time. Penyediaan informasi yang andal ini merupakan salah satu karakteristik penting dari sistem informasi akuntansi. Keempat, implementasi E-SAMSAT menunjukkan dukungan terhadap modernisasi administrasi perpajakan

melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan fungsi SIA dalam pengelolaan data dan pelayanan pajak kepada wajib pajak. Untuk melakukan pembayaran melalui E-SAMSAT, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam server samsat dan data nasabah di bank
- 2) Pembayaran PKB dilakukan pada Bank yang telah ditetapkan.
- 3) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan.
- 4) Kendaraan tidak dalam status blokir.

2.1.5.4 Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan penelitian Utami & Estiningrum (2023), indikator Sistem Informasi Akuntansi meliputi:

1. Kemudahan penggunaan sistem

Menggambarkan sejauh mana sistem E-SAMSAT mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Keandalan sistem

Menunjukkan kemampuan sistem E-SAMSAT untuk beroperasi secara stabil dan konsisten tanpa sering mengalami gangguan teknis.

3. Keakuratan informasi perpajakan

Menggambarkan tingkat ketepatan informasi yang dihasilkan sistem, seperti besaran pajak terutang dan status pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Kecepatan dan efisiensi pelayanan

Menunjukkan kemampuan sistem E-SAMSAT dalam mempercepat proses pembayaran pajak dan mengurangi waktu serta prosedur administrasi dibandingkan sistem manual.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian oleh Ardani & Kurniawati (2024), indikator sistem informasi perpajakan meliputi :

1. Kemudahan penggunaan sistem: menunjukkan bahwa E-SAMSAT mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak.
2. Kecepatan proses transaksi: mencerminkan kemampuan sistem dalam memproses pembayaran pajak secara cepat dan efisien.
3. Keakuratan informasi yang diberikan: menunjukkan ketepatan data pajak yang ditampilkan oleh sistem.
4. Keamanan sistem dalam transaksi pembayaran: menunjukkan kemampuan sistem dalam melindungi data dan transaksi wajib pajak.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi yang efektif harus mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengkaji berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas administrasi perpajakan, sistem informasi akuntansi melalui E-SAMSAT, serta kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor digunakan sebagai bahan pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lubis & Sukoco (2021)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi mampu meningkatkan kemudahan dan kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan.
2.	Utami & Estiningrum (2023)	Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem yang andal dan mudah digunakan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.
3.	Nuraini & Furqon (2023)	Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan pemahaman wajib pajak.
4.	Supriatiningsih et al. (2023)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi yang tertib dan mudah dipahami mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
5	Susanty et al. (2023)	Pengaruh Penerapan E-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-SAMSAT dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sistem E-

			SAMSAT yang lebih baik dan sanksi yang diterapkan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
6.	Wafqi & Alghaviqi (2023))	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi E-SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-SAMSAT memberikan kemudahan dan transparansi pembayaran pajak sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak.
7.	Oktavianingrum (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-SAMSAT Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi online E-SAMSAT Jabar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan E-SAMSAT memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam pembayaran pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.
8.	Damanik (2021)	Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Administrasi perpajakan yang akuntabel meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
9.	Bahrien & Purba (2024)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi, dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepercayaan wajib pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
10.	Nisa & Saepuloh (2025)	Pengaruh Penerapan Program E-SAMSAT dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program E-SAMSAT dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Kantor Samsat Kabupaten Bandung II Soreang	kendaraan bermotor. E-SAMSAT mempermudah proses pembayaran pajak melalui layanan berbasis teknologi informasi, mengurangi antrian serta hambatan birokrasi. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Akuntabilitas administrasi perpajakan merujuk pada sejauh mana sistem administrasi pajak dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan dapat diakses oleh wajib pajak. Administrasi perpajakan yang akuntabel ditunjukkan melalui kejelasan prosedur, keterbukaan informasi pajak, kepastian waktu pelayanan, serta tanggung jawab petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan perpajakan. Kondisi tersebut memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akuntabilitas administrasi perpajakan berperan penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan daerah. Ketika wajib pajak merasa bahwa proses administrasi pajak dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak berbelit-belit, maka sikap positif terhadap kewajiban perpajakan akan terbentuk. Penelitian terdahulu yang dilakukan Damanik (2021) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang tertata dan jelas berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan pentingnya

pengelolaan administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, Supriatiningsih et al. (2023) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan yang tertata dan dapat dipertanggungjawabkan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut, Bahrien & Purba (2024) menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana kepercayaan wajib pajak juga turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, Lubis & Sukoco (2021) menemukan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang efisien berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena modernisasi administrasi mampu meningkatkan kemudahan dan kepercayaan wajib pajak. Sejalan dengan itu, Putri & Lia (2025) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pengelolaan perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena pelayanan perpajakan yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan mampu membangun kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam administrasi perpajakan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menyajikan informasi perpajakan. Melalui E-SAMSAT, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan praktis.

Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik melalui E-SAMSAT diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif, seperti antrian panjang, keterbatasan waktu pelayanan, dan kompleksitas prosedur pembayaran pajak. Kemudahan akses dan kejelasan informasi yang disediakan oleh sistem E-SAMSAT dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa & Saepuloh (2025) menunjukkan bahwa penerapan program E-SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa E-SAMSAT memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak, sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak untuk patuh.

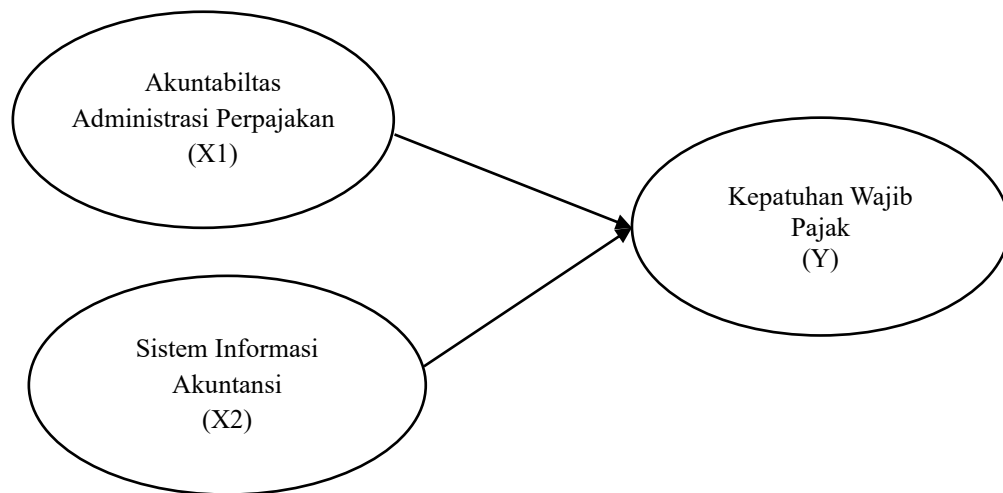
Lebih lanjut, Wafqi & Alghaviqi (2023) dalam penelitiannya pada Kantor Samsat Kabupaten Garut menemukan bahwa penerapan sistem informasi E-

SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena E-SAMSAT memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses pembayaran pajak. Sementara itu, Oktavianingrum (2021) dalam penelitiannya pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran menemukan bahwa penerapan sistem informasi online E-SAMSAT Jabar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di mana kemudahan akses dan efisiensi pembayaran pajak secara online mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Sejalan dengan itu, Susanty et al. (2023) menemukan bahwa penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di mana sistem E-SAMSAT yang lebih baik cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi melalui penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena kemudahan akses, keandalan sistem, dan efisiensi pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor..

Untuk memperjelas hubungan antar variabel yang telah diuraikan dalam kerangka konseptual, penulis menyajikannya dalam bentuk gambar kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut skema kerangka konseptual penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih bersifat dugaan dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jawaban tersebut belum bersifat final karena kebenarannya akan diuji melalui data yang diperoleh dari proses penelitian. Dengan demikian, hipotesis berperan sebagai pernyataan sementara yang digunakan sebagai dasar dalam pengujian kebenaran suatu penelitian (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan kerangka teori dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akuntabilitas administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian berbentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Adapun jenis asosiatif kausal dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sebab-akibat antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2019). Penelitian asosiatif kausal digunakan karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sesuai peraturan, dan atas dasar kesadaran sendiri, yang tercermin dari ketepatan pembayaran, kelengkapan administrasi, dan konsistensi pelaporan pajak.	Menurut Damanik (2021) Kepatuhan wajib pajak meliputi: 1. Ketepatan waktu pembayaran pajak 2. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi 3. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan 4. Kesadaran wajib pajak 5. Ketepatan pelaporan data	Ordinal

2.	Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X_1)	Akuntabilitas administrasi perpajakan adalah penyelenggaraan pelayanan pajak yang dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tercermin dari kepastian prosedur, tanggung jawab aparatur, dan keteraturan pelaksanaan administrasi.	Menurut Damanik (2021) indikator akuntabilitas administrasi perpajakan meliputi: 1. Transparansi administrasi 2. Kejelasan dan kepastian prosedur 3. Tanggung jawab aparatur pajak 4. Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi pajak	Ordinal
3.	Sistem Informasi Akuntansi (X_2)	Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem berbasis teknologi yang memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-SAMSAT, yang tercermin dari kemudahan penggunaan, keandalan sistem, keakuratan informasi, serta efisiensi pelayanan.	Menurut Utami & Estiningrum (2023) indikator Sistem Informasi Akuntansi meliputi: 1. Kemudahan penggunaan sistem 2. Keandalan sistem 3. Keakuratan informasi perpajakan 4. Kecepatan dan efisiensi pelayanan	Ordinal

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan di kantor UPT Samsat Lubuk Pakam, yang beralamat di Jl. Tirta Deli, Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20518.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan bulan April 2026.

Tabel 3.2 Rencana Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																							
		November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				Maret 2026				April 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Pendahuluan	■	■																						
2	Identikasi Masalah		■	■																					
3	Pengajuan Judul			■	■	■	■																		
4	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■														
5	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■										
6	Seminar Proposal																	■							
7	Penyusunan Instrumen																		■						
8	Penyebaran Kuesioner																			■					
9	Pengumpulan Data																			■	■				
10	Pengolahan Data																			■	■	■			
11	Analisis Data																			■	■	■	■		
12	Sidang Meja Hijau																							■	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam

penelitian ini, populasi mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Lubuk Pakam pada tahun 2024, dengan jumlah total 119.753 wajib pajak.

3.4.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus slovin, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimum dari suatu populasi yang diketahui jumlahnya dengan tingkat toleransi kesalahan tertentu (Sugiyono, 2017).

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{119.753}{1 + 119.753(0.1)^2} = 99,916$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 10%)

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, ukuran sampel dalam penelitian ini ditetapkan 100 orang. Sampel penelitian terdiri dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT. Samsat Lubuk Pakam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau objek penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Lubuk Pakam.

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengukuran variabel dalam kuesioner menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, setiap item pernyataan memiliki lima alternatif jawaban dengan skor sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Likert

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (ST)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019), sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya

melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT Samsat Lubuk Pakam, data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, data penggunaan layanan E-SAMSAT, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.6 Uji Instrumen Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Sebelum digunakan untuk pengumpulan data, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Uji instrumen dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten (Sugiyono, 2018).

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir pernyataan dengan skor total. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Adapun rumus korelasi Product Moment Pearson adalah sebagai berikut:

Keterangan:

$$r^{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum Y^2 - (\sum y)^2)}}$$

r_{xy} = Item Instrument variabel dengan totalnya.

x = Jumlah butir pertanyaan

y = Skor total pertanyaan

n = Jumlah Sampel

Adapun kriteria pengujian menurut (Juliandi et al., 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $>$ R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- b. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $<$ R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid

Pengujian dilakukan menggunakan data dari 30 responden sebagai sampel awal untuk melihat tingkat validitas setiap item instrumen. Sampel awal ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh item pernyataan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum digunakan pada penelitian utama.

Tabel 3.4 Uji Validitas

Item Pernyataan		r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,858	0,361	Valid
	X1.2	0,842	0,361	Valid
	X1.3	0,871	0,361	Valid
	X1.4	0,828	0,361	Valid
	X1.5	0,825	0,361	Valid
	X1.6	0,833	0,361	Valid
	X1.7	0,887	0,361	Valid
	X1.8	0,769	0,361	Valid
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	X2.1	0,790	0,361	Valid
	X2.2	0,822	0,361	Valid
	X2.3	0,843	0,361	Valid
	X2.4	0,784	0,361	Valid
	X2.5	0,718	0,361	Valid
	X2.6	0,781	0,361	Valid
	X2.7	0,706	0,361	Valid
	X2.8	0,904	0,361	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,793	0,361	Valid
	Y2	0,783	0,361	Valid
	Y3	0,777	0,361	Valid
	Y4	0,753	0,361	Valid
	Y5	0,836	0,361	Valid
	Y6	0,808	0,361	Valid
	Y7	0,897	0,361	Valid
	Y8	0,931	0,361	Valid
	Y9	0,825	0,361	Valid
	Y10	0,835	0,361	Valid

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 30 responden, dengan menggunakan nilai r tabel sebesar 0,361 ($df = n-2 = 28$, $\alpha = 5\%$), diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada ketiga variabel penelitian menunjukkan nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel}. Variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1) memiliki nilai r_{hitung} berkisar antara 0,769 hingga 0,887; variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) berkisar antara 0,706 hingga 0,904; dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berkisar antara 0,753 hingga 0,931. Dengan demikian, seluruh 26 item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Juliandi et al., 2021) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat/mengukur apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma^2} \right)$$

reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Juliandi et al., 2021). Menurut (Sugiyono, 2018) menggunakan teknik *Cronbach Alpha* dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

r = Reliabilitas instrument

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum\sigma^2$ = Jumlah varians butir

σ^2 = Varian total

Kriteria pengujiannya:

- a. Jika nilai koefisien reliabilitas yakni *cronbach alpha* > 0,60 maka instrumen variabel adalah reliabel (terpercaya).
- b. Jika nilai *cronbach alpha* 0,60 maka variabel tidak reliabel (tidak dipercaya). Realibilitas berkaitan dengan tingkat keandalan suatu instrument penelitian. Berdasarkan kriteria pengujiannya maka pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel jika hasil $\alpha > 0,60$.

Hasil pengujian reliabilitas pada 30 responden ditampilkan pada tabel di bawah ini, yang memperlihatkan nilai Cronbach's Alpha setiap item instrumen. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai tingkat keandalan instrumen sebelum diterapkan pada seluruh sampel penelitian.

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)	0,938	Realibilitas Baik
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,942	Realibilitas Baik
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,959	Realibilitas Baik

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1) sebesar 0,938, variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) sebesar 0,942, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,959. Keseluruhan nilai Cronbach's Alpha tersebut berada di atas batas minimum 0,60, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik dan dapat digunakan secara konsisten dalam pengukuran variabel penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, pengujian model pengukuran (outer model), pengujian model struktural (inner model), serta pengujian hipotesis.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeTugas akhirkkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

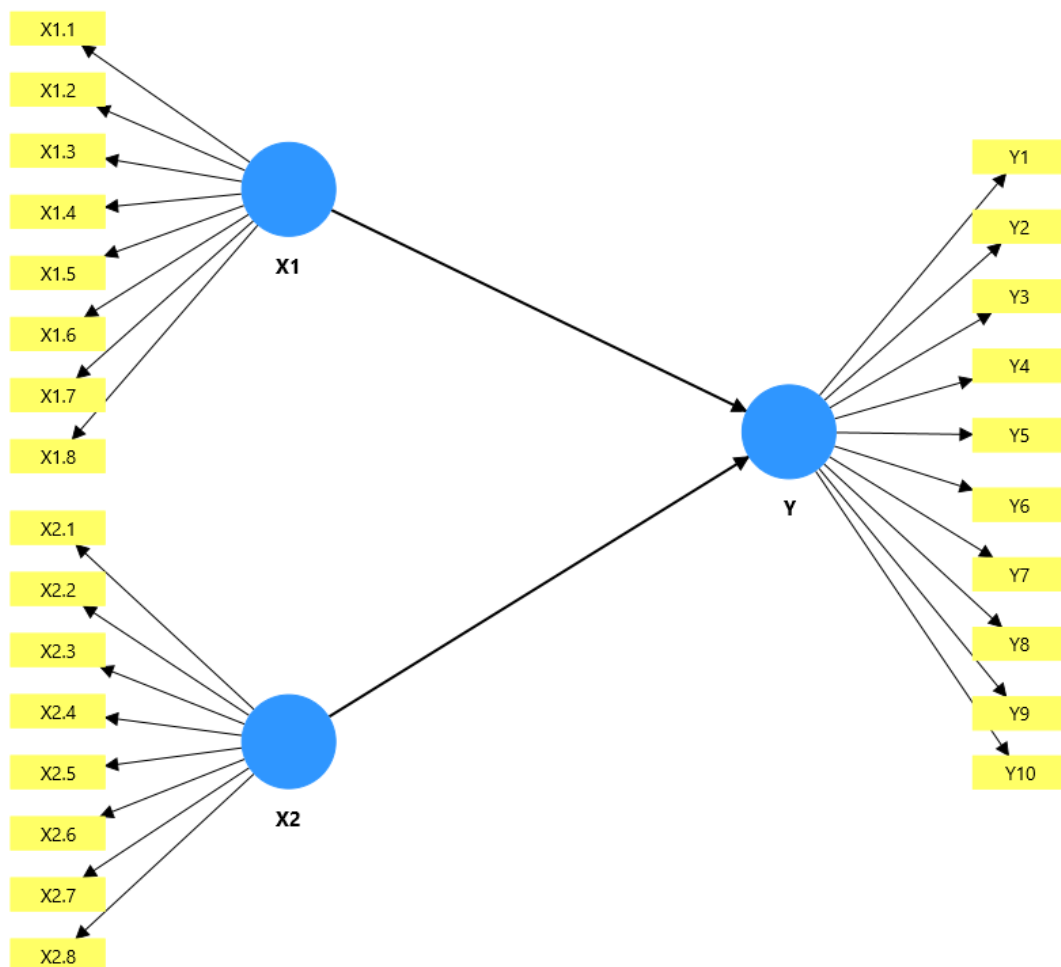
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deTugas akhir suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.7.2 Analisis SEM (Structural Equation Modeling)

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS. Menurut Ghozali & Latan (2015) PLS adalah metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten.

PLS (*partial least square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Penggunaan metode SEM-PLS dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih jelas dalam melihat hubungan antar variabel laten.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis model penelitian secara bertahap dan sistematis, sehingga dapat mendukung pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Berdasarkan pendekatan SEM-PLS, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (Outer Model) dan evaluasi model structural (Inner Model).



Gambar 3.1 Model Struktural PLS

3.7.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model dalam PLS-SEM dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model (Ghozali, 2018). Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data diharapkan hasil penelitian akan menjadi

valid dan reliabel (Sugiyono, 2017). Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa statistic :

1. *Convergent Validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item skor dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 % dengan konstruk yang diukur. Untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai, dan Average Variance Extracted (AVE) $\geq 0,50$ digunakan sebagai tambahan untuk menilai validitas konstruk (Ghozali & Latan, 2015).
2. *Discriminant validity*, merupakan uji validitas yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya. *Discriminant validity* menunjukkan bahwa indikator suatu konstruk tidak memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk lain dibandingkan dengan konstruk yang diukurnya sendiri. Dalam penelitian ini, *discriminant validity* dinilai menggunakan *cross loading*, di mana suatu konstruk dinyatakan valid secara diskriminan apabila nilai loading indikator pada konstruk yang diukurnya lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya (Ghozali & Latan, 2015).
3. *Composite Reliability*, merupakan ukuran reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur suatu konstruk laten pada metode SEM-PLS. Nilai *Composite Reliability* menunjukkan sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk memiliki keandalan yang baik. Menurut Ghozali & Latan (2015), nilai *Composite Reliability* $\geq 0,70$

menunjukkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.

4. *Cronbach's Alpha*, merupakan ukuran reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur suatu konstruk laten. Nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk saling berkorelasi dan mampu mengukur konstruk yang sama secara konsisten. Menurut Ghozali & Latan (2015), nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$ menunjukkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.

3.7.4 Evaluasi model structural (Inner Model)

Menurut Ghozali & Latan (2015), evaluasi model struktural (inner model) adalah tahap dalam analisis SEM-PLS yang digunakan untuk menilai hubungan antar variabel laten serta menguji pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen sesuai dengan hipotesis. Evaluasi inner model bertujuan untuk menilai kemampuan model menjelaskan variabel dependen serta kekuatan pengaruh antar variabel laten (Ghozali, 2018). Beberapa ukuran yang diperhatikan antara lain:

1. Koefisien jalur (*path coefficient*): menunjukkan arah dan besarnya pengaruh antar variabel laten. Nilai positif berarti hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Untuk menilai signifikansi pengaruh, koefisien jalur diuji menggunakan t-statistik dan p-value. Hasil ini menjadi dasar untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak.

2. R squared (R^2): mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Interpretasi umum: $R^2 \geq 0,75$ (kuat), $0,50$ (sedang), $0,25$ (lemah)
3. F squared (F^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Nilai F^2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: $F^2 \geq 0,35$ menunjukkan pengaruh besar, $F^2 \geq 0,15$ menunjukkan pengaruh sedang, dan $F^2 \geq 0,02$ menunjukkan pengaruh kecil (Ghozali & Latan, 2015).

3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel laten sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Pengujian dilakukan setelah model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) dinyatakan valid dan reliabel, sehingga hasil uji dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2017). Hipotesis diterima jika nilai $t > 1,96$ pada tingkat signifikansi 5% atau $p\text{-value} < 0,05$. Hipotesis ditolak jika nilai $t \leq 1,96$ atau $p\text{-value} \geq 0,05$ (Ghozali, 2018). Nilai t menunjukkan berapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara relatif terhadap kesalahan standar, sedangkan $p\text{-value}$ menunjukkan probabilitas hasil pengujian terjadi secara kebetulan; semakin kecil $p\text{-value}$, semakin kuat bukti pengaruh tersebut signifikan secara statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

4.1.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 8 pernyataan untuk variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), 8 pernyataan untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan 10 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Dari total 100 kuesioner yang disebarakan, seluruhnya berhasil dikembalikan dan dapat diolah, sehingga tingkat pengembalian kuesioner (response rate) mencapai 100%. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini dinilai cukup representatif untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

4.1.2 Karakteristik Responden

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – laki	67	67%
Perempuan	33	33%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 67 orang (67%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 33 (33%) orang. Bisa di tarik

kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah laki-laki pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 25	18	18%
26 – 35	36	36%
36 – 45	27	27%
> 45	19	19%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa responden terdiri dari wajib pajak yang berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 18 orang (18%), berumur 26–35 tahun sebanyak 36 orang (36%), berumur 36–45 tahun sebanyak 27 orang (27%), dan yang berumur lebih dari 45 tahun sebanyak 19 orang (19%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang berumur 26–35 tahun pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentanse (%)
PNS	12	12%
Wiraswasta	34	34%
Pegawai Swasta	29	29%

Mahasiswa	9	9%
Lainnya	16	16%

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa responden terdiri dari wajib pajak yang bekerja sebagai PNS sebanyak 12 orang (12%), Wiraswasta sebanyak 34 orang (34%), Pegawai Swasta sebanyak 29 orang (29%), Mahasiswa sebanyak 9 orang (9%), dan Lainnya sebanyak 16 orang (16%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang bekerja sebagai Wiraswasta pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang telah disebar. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, kurtosis, dan skewness dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

4.2.1 Variabel Akuntabilitas Admimistasi Perpajakan

Berikut disajikan tabel statistik deskriptif variabel akuntabilitas administrasi perpajakan yang menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan jawaban responden pada setiap indikator penelitian.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X1.1	3,86	1	5	0,62	-0,994	-0.313
X1.2	3,83	1	5	1,03	-0,973	-0.431
X1.3	3,93	1	5	0,68	-0,871	-0.454
X1.4	3,91	1	5	0,67	-0,784	-0.483
X1.5	3,86	1	5	0,67	-0,884	-0.381
X1.6	3,82	1	5	0,67	-0,821	-0.379
X1.7	3,98	1	5	0,61	-0,546	-0.491
X1.8	3,90	1	5	0,69	-1,18	-0.291

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1) memiliki nilai rata-rata (mean) berkisar antara 3,82 hingga 3,98 dari skala 1–5. Nilai mean tertinggi terdapat pada indikator X1.7 sebesar 3,98, sedangkan terendah pada X1.6 sebesar 3,82. Nilai mean tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian setuju terhadap pernyataan yang diajukan.

Nilai standar deviasi berkisar antara 0,61 hingga 1,03 yang menunjukkan bahwa jawaban responden relatif seragam. Nilai skewness yang negatif menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan jawaban tinggi, sedangkan nilai kurtosis yang negatif menunjukkan distribusi data yang lebih datar. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap akuntabilitas administrasi perpajakan di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

4.2.2 Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Berikut disajikan tabel statistik deskriptif variabel sistem informasi akuntansi yang menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan jawaban responden pada setiap indikator penelitian.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Sistem Informasi Akuntansi

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
X2.1	3,76	1	5	1,01	-0.994	-0.324
X2.2	3,91	1	5	0,61	-0.619	-0.372
X2.3	3,90	1	5	0,68	-0.947	-0.388
X2.4	3,86	1	5	0,69	-1.012	-0.340
X2.5	3,89	1	5	0,67	-0.702	-0.513
X2.6	3,87	1	5	1,01	-0.971	-0.430
X2.7	3,96	1	5	0,65	-0.536	-0.585
X2.8	3,93	1	5	0,63	-0.687	-0.429

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) memiliki nilai rata-rata (mean) berkisar antara 3,76 hingga 3,96 dari skala 1–5. Nilai mean tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Nilai mean tertinggi terdapat pada indikator X2.7 sebesar 3,96, sedangkan terendah pada X2.1 sebesar 3,76.

Nilai standar deviasi berkisar antara 0,61 hingga 1,01 yang menunjukkan bahwa jawaban responden relatif seragam. Nilai skewness yang negatif menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan jawaban tinggi, sedangkan nilai kurtosis yang negatif menunjukkan distribusi data yang lebih datar. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan di UPT SAMSAT Lubuk Pakam dinilai baik oleh responden.

4.2.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut disajikan tabel statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak yang menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan jawaban responden pada setiap indikator penelitian.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Name	Mean	Scale min	Scale max	Standard deviation	Excess kurtosis	Skewness
Y1	3,91	1	5	1,00	-0.883	-0.485
Y2	4,01	1	5	1,02	-0.689	-0.700
Y3	3,90	1	5	0,66	-0.763	-0.475
Y4	4,02	1	5	0,63	-0.722	-0.515
Y5	3,91	1	5	0,67	-0.901	-0.416
Y6	3,89	1	5	0,65	-0.906	-0.349
Y7	3,80	1	5	1,05	-1.059	-0.411
Y8	3,81	1	5	1,03	-0.979	-0.430
Y9	3,80	1	5	1,06	-1.110	-0.390
Y10	3,81	1	5	1,08	-1.060	-0.474

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai rata-rata (mean) berkisar antara 3,80 hingga 4,02 dari skala 1–5. Nilai mean tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Nilai mean tertinggi terdapat pada indikator Y4 sebesar 4,02, sedangkan terendah pada indikator Y7, Y9, dan Y10 sebesar 3,80.

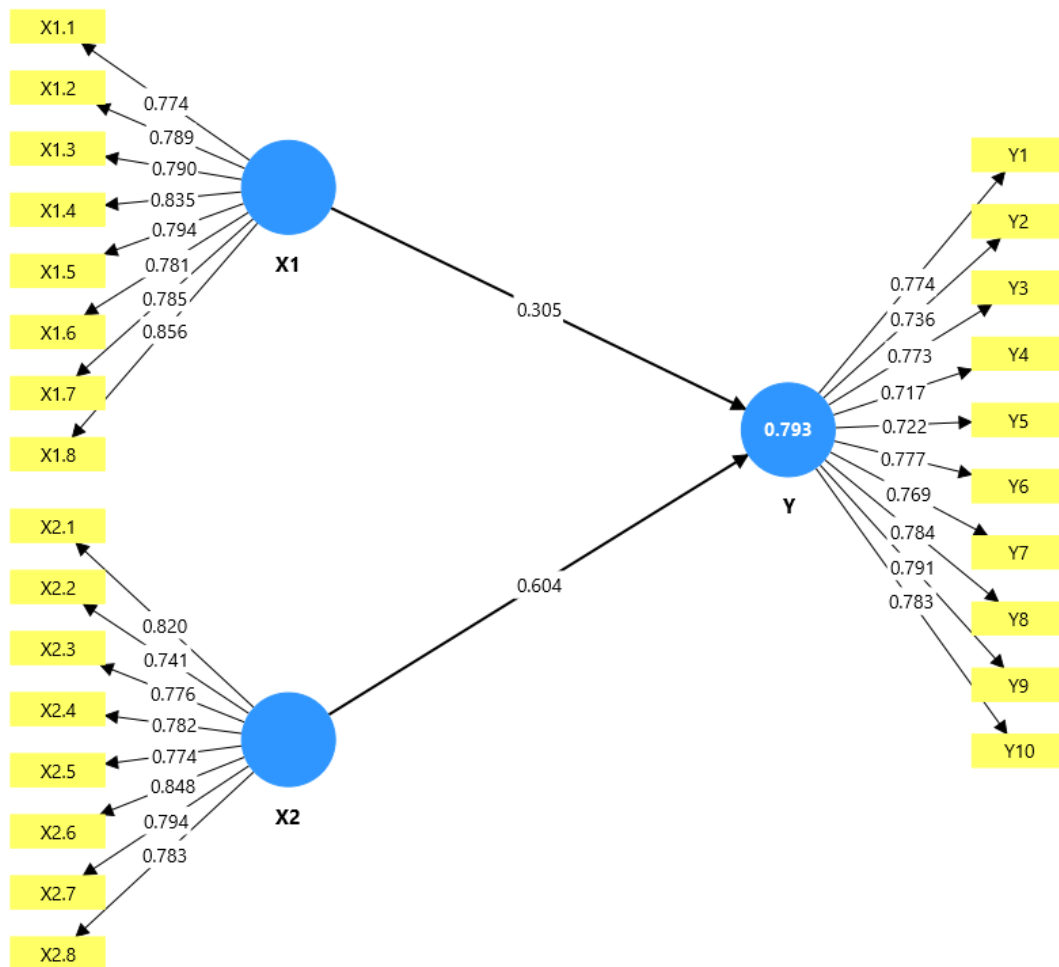
Nilai standar deviasi berkisar antara 0,63 hingga 1,08 yang menunjukkan bahwa jawaban responden relatif seragam, meskipun beberapa indikator memiliki variasi yang sedikit lebih besar. Nilai skewness yang negatif menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan jawaban tinggi, sedangkan nilai kurtosis yang negatif menunjukkan distribusi data yang lebih datar.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam analisis menggunakan SmartPLS, evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha. Berikut disajikan skema model hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS dalam mengevaluasi outer model.



Gambar 4.1 Standardized Loading Factor

Model pengukuran atau outer model ini menspesifikasi antar variabel laten dengan indikatornya atau menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (Juliandi et al., 2018).

4.3.1.1 Convergent Validity

Convergent Validity merupakan salah satu kriteria dalam evaluasi model pengukuran (outer model) yang digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara indikator dengan konstruksinya. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), di mana indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading $> 0,70$ dan nilai AVE $> 0,50$ (Ghozali, 2016).

a. *Loading Factor/ Outer Loading*

Tabel 4.7 Nilai Outer Loading

Pernyataan	Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)	Sistem Informasi Akuntansi (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Keterangan
X1.1	0.774			Valid
X1.2	0.789			Valid
X1.3	0.790			Valid
X1.4	0.835			Valid
X1.5	0.794			Valid
X1.6	0.781			Valid
X1.7	0.785			Valid
X1.8	0.856			Valid
X2.1		0.820		Valid
X2.2		0.741		Valid
X2.3		0.776		Valid
X2.4		0.782		Valid
X2.5		0.774		Valid
X2.6		0.848		Valid
X2.7		0.794		Valid
X2.8		0.783		Valid

Pernyataan	Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)	Sistem Informasi Akuntansi (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Keterangan
Y1			0.774	Valid
Y2			0.736	Valid
Y3			0.773	Valid
Y4			0.717	Valid
Y5			0.722	Valid
Y6			0.777	Valid
Y7			0.769	Valid
Y8			0.784	Valid
Y9			0.791	Valid
Y10			0.783	Valid

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *outer loading* yang disajikan pada tabel di atas, seluruh indikator dari ketiga variabel penelitian telah memenuhi batas minimum nilai *loading factor* yang dipersyaratkan, yaitu lebih besar dari 0,70. Hal ini berlaku untuk seluruh indikator pada variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), maupun Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruksya masing-masing dengan baik, sehingga memenuhi syarat *convergent validity* berdasarkan kriteria *outer loading*.

b. Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 4.7 Average variance extracted

Variabel	Average variance extracted (AVE)	Keterangan
Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)	0,642	Valid
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,625	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,582	Valid

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian AVE yang disajikan pada tabel di atas, variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) seluruhnya memperoleh nilai AVE yang melebihi batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu lebih besar dari 0,50. Terpenuhinya kriteria ini menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians dari indikator-indikatornya masing-masing. Dengan demikian, ketiga variabel dalam model penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat *convergent validity* berdasarkan kriteria AVE.

4.3.1.2 Discriminant Validity

Discriminant Validity digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk dapat dibedakan dari konstruk lainnya. Suatu konstruk dinyatakan valid apabila memiliki nilai yang lebih tinggi pada konstraknya dibandingkan dengan konstruk lain (Ghozali, 2016).

Tabel 4.8 Discriminant Validity

Instrumen	X1	X2	Y
X1.1	0.774	0.683	0.636
X1.2	0.789	0.773	0.669
X1.3	0.790	0.709	0.675
X1.4	0.835	0.744	0.698
X1.5	0.794	0.689	0.636
X1.6	0.781	0.719	0.682
X1.7	0.785	0.702	0.680
X1.8	0.856	0.800	0.783

Instrumen	X1	X2	Y
X2.1	0.732	0.820	0.689
X2.2	0.667	0.741	0.656
X2.3	0.660	0.776	0.686
X2.4	0.737	0.782	0.613
X2.5	0.712	0.774	0.682
X2.6	0.766	0.848	0.776
X2.7	0.729	0.794	0.702
X2.8	0.744	0.783	0.748
Y1	0.653	0.667	0.774
Y2	0.695	0.709	0.736
Y3	0.637	0.657	0.773
Y4	0.618	0.651	0.717
Y5	0.598	0.611	0.722
Y6	0.634	0.623	0.777
Y7	0.650	0.691	0.769
Y8	0.693	0.680	0.784
Y9	0.662	0.721	0.791
Y10	0.668	0.699	0.783

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *discriminant validity* melalui tabel *cross loading* di atas, seluruh indikator dari variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai *loading* tertinggi pada konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lainnya. Artinya, indikator-indikator yang mengukur X1 lebih kuat mencerminkan konstruk X1, indikator X2 lebih kuat mencerminkan konstruk X2, dan indikator Y lebih kuat mencerminkan konstruk Y. Pola ini menunjukkan bahwa ketiga konstruk dalam model penelitian ini dapat

dibedakan secara jelas satu sama lain, sehingga seluruh variabel dinyatakan telah memenuhi syarat *discriminant validity*.

4.3.1.3 Construct Reliability

Construct Reliability digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu konstruk dalam menjelaskan indikator-indikatornya. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha lebih dari 0,70 (Ghozali, 2016).

a. *Composite Reliability*

Tabel 4.9 Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
X1	0,935	Reliabel
X2	0,930	Reliabel
Y	0,933	Reliabel

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *Composite Reliability* yang disajikan pada tabel di atas, variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) seluruhnya memperoleh nilai yang jauh melampaui batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu lebih besar dari 0,70. Tingginya nilai *Composite Reliability* pada ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik dalam mencerminkan indikator-indikatornya. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini dinyatakan reliabel berdasarkan kriteria *Composite Reliability*.

b. *Cronbach's Alpha***Tabel 4.10 Nilai *Cronbach's Alpha***

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X1	0,920	Reliabel
X2	0,920	Reliabel
Y	0,914	Reliabel

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Hasil pengujian *Cronbach's Alpha* pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) seluruhnya memperoleh nilai yang melebihi batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu lebih besar dari 0,70. Hasil ini mengonfirmasi bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel tersebut memiliki tingkat keandalan dan konsistensi internal yang tinggi. Dengan terpenuhinya kedua kriteria *Composite Reliability* maupun *Cronbach's Alpha*, maka seluruh konstruk dalam model penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat *construct reliability* secara keseluruhan.

4.3.2 Analisis Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konstruk laten dalam penelitian. Penilaian inner model dapat dilihat melalui nilai *R-Square* (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta nilai *F-Square* (f^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.3.2.1 R-Square (R^2)

R-Square (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai *R-Square* berkisar antara 0–1, di mana menurut Ghozali (2016), nilai 0,75 (kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah).

Tabel 4.11 Nilai *R-Square* (R^2)

Variabel Dependen	<i>R-Square</i>	<i>R-Square adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.793	0.788

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *R-Square*, variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,793 dan *R-Square Adjusted* sebesar 0,788. Nilai ini tergolong kuat karena melebihi 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 79,3% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

4.3.2.2 F-Square (F^2)

Nilai *F-Square* (F^2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai F^2 , maka semakin besar peran variabel tersebut dalam model penelitian.

Tabel 4.12 Nilai F-Square (F²)

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak KB
Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)	0.078
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0.304

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian F-Square yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi efek masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kriteria Cohen (1988), nilai f^2 dikategorikan lemah apabila berada di kisaran 0,02, sedang pada 0,15, dan kuat pada 0,35. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1) memiliki nilai f^2 sebesar 0,078 yang tergolong dalam kategori kecil, sedangkan variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) memiliki nilai f^2 sebesar 0,304 yang tergolong dalam kategori sedang dan mendekati kategori kuat. Dengan demikian, dalam model penelitian ini, Sistem Informasi Akuntansi memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan dengan Akuntabilitas Administrasi Perpajakan.

4.3.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian dengan melihat nilai *path coefficient*, *T-statistics*, dan *P-values*. Pengujian ini mengacu pada nilai *path coefficient*, adapun hasil pengujian hipotesis berdasarkan nilai *path coefficient* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis

Koefisiensi Jalur	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values
X1 -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.305	0.311	0,123	2.485	0.013
X2 -> Kepatuhan Wajib Pajak KB	0.604	0.600	0,116	5.201	0.000

Sumber : Data diolah SmartPLS, 2026

pengujian dilakukan dengan mengacu pada nilai *T-statistics* dan *P-value*, di mana hipotesis diterima apabila nilai *T-statistics* > 1,96 dan *P-value* < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H1 diterima. Demikian pula, Sistem Informasi Akuntansi (X2) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H2 diterima. Nilai *path coefficient* pada kedua jalur menunjukkan arah pengaruh yang positif, yang berarti semakin baik akuntabilitas administrasi perpajakan dan sistem informasi akuntansi yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0,305 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,013, maka $0,013 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Akuntabilitas Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.

Temuan ini mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan yang tercermin dari transparansi prosedur, kejelasan informasi, tanggung jawab aparatur pajak, dan pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat dan konsisten.

Kondisi ini dapat dipahami karena wajib pajak yang merasakan bahwa institusi perpajakan bekerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan tumbuh rasa percaya dan keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan benar. Kepercayaan inilah yang pada akhirnya menjadi dorongan kuat bagi wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya, bukan semata-mata karena tekanan atau sanksi. Ketika prosedur pembayaran pajak jelas, petugas bertanggung jawab, dan informasi mudah diakses, hambatan psikologis maupun administratif yang selama ini menjadi alasan keengganan wajib pajak pun dapat diminimalkan.

Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks perpajakan, akuntabilitas yang tinggi akan membentuk kepercayaan publik (*public trust*) yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut Rahayu (2021), salah satu faktor utama

yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan administrasi perpajakan yang cepat, mudah, dan transparan — yang merupakan cerminan langsung dari tingkat akuntabilitas administrasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Damanik (2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena administrasi yang akuntabel terbukti mampu membangun kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil yang serupa juga dikemukakan oleh Supriatiningsih et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan berpengaruh signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, Bahrien & Purba (2024) turut memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa transparansi administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4.4.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mempunyai koefisien jalur sebesar 0,604 (positif), dan memiliki nilai *P-Values* sebesar 0,000, maka $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Selain itu, nilai koefisien jalur sebesar 0,604 lebih besar dibandingkan dengan variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan sebesar 0,305, sehingga

Sistem Informasi Akuntansi merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini didukung oleh pendapat Romney & Steinbart (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang baik harus mampu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks perpajakan, SIA yang berkualitas memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) yang berujung pada peningkatan kepatuhan. Hal ini selaras dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menjadi landasan teori penelitian ini, di mana persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dalam penelitian ini dicerminkan oleh kemudahan penggunaan E-SAMSAT secara langsung memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini selaras dengan penelitian Utami & Estiningrum (2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang andal, mudah digunakan, dan menghasilkan informasi yang akurat terbukti dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, Susanty et al. (2023) serta Wafqi & Alghaviqi (2023) menemukan bahwa penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, di mana kemudahan dan transparansi yang ditawarkan sistem tersebut menjadi faktor kunci yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Nisa & Saepuloh (2025) menambahkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi seperti E-SAMSAT secara signifikan mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan

kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS) terhadap 100 responden, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam, sehingga H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, kejelasan prosedur, dan pertanggungjawaban aparatur dalam pengelolaan administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang merasakan bahwa sistem perpajakan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan konsisten.
2. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam, sehingga H2 diterima. Sistem Informasi Akuntansi yang direpresentasikan melalui penerapan E-SAMSAT terbukti menjadi variabel

dengan pengaruh paling dominan dalam penelitian ini. Kemudahan akses, keandalan sistem, keakuratan informasi, dan efisiensi pelayanan yang ditawarkan melalui E-SAMSAT secara nyata mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi alasan keterlambatan atau keengganan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan meningkat secara signifikan.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya bergantung pada kesadaran individu semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh seberapa baik institusi perpajakan dalam membangun sistem yang akuntabel, transparan, dan didukung teknologi informasi yang handal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi UPT SAMSAT Lubuk Pakam

Mengingat Sistem Informasi Akuntansi merupakan faktor paling dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, UPT SAMSAT Lubuk Pakam perlu meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan E-SAMSAT secara berkelanjutan, melalui sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan sistem agar lebih ramah pengguna, serta menjaga keandalan dan keamanan sistem. Selain itu, peningkatan transparansi, kejelasan prosedur, dan kualitas pelayanan juga perlu dilakukan untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah disarankan untuk memperkuat dukungan infrastruktur teknologi informasi perpajakan daerah, termasuk perluasan aksesibilitas E-SAMSAT hingga menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal. Selain itu, penguatan regulasi terkait standar akuntabilitas administrasi perpajakan serta program literasi pajak yang berkelanjutan perlu ditingkatkan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat tumbuh secara menyeluruh di masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, atau kepercayaan terhadap pemerintah, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perluasan wilayah penelitian ke beberapa UPT SAMSAT lain serta penggunaan variabel mediasi atau moderasi juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya temuan dan meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur ilmiah yang berlaku, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memaknai hasil penelitian ini:

1. Lingkup penelitian hanya mencakup satu lokasi, yaitu UPT SAMSAT Lubuk Pakam, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat merepresentasikan kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara lebih luas di seluruh wilayah Sumatera Utara maupun daerah lainnya.

2. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner berbasis persepsi responden, yang membuka peluang terjadinya bias subjektivitas dalam pemberian jawaban. Kondisi ini tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh peneliti, sehingga jawaban yang diperoleh belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dialami responden.
3. Model penelitian ini hanya mengakomodasi dua variabel independen, sementara kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang jauh lebih luas. Hal ini tercermin dari 20,7% variasi yang tidak mampu dijelaskan oleh model, yang mengisyaratkan masih terdapatnya variabel-variabel lain di luar penelitian ini yang turut berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, D. D., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2022). *The influence of the E-SAMSAT program, Mobile SAMSAT, SAMSAT Drive Thru, tax socialization and moral obligation program compliance on motor vehicle taxpayer compliance registered with SAMSAT Subang*. *Journal of Taxation Analysis and Review*, 3(1), 18–37.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Ardani, R. K., & Kurniawati, L. (2024). *The influence of the E-SAMSAT program, quality of tax officer services, taxation socialization, and moral obligations on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes*. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(3), 171–182.
- Ardila, I., Sembiring, M., & Astuti, R. (2025). *The Role of Security Perception and Usage Impact of Mobile Accounting Applications*. *Jurnal Akuntansi*, 29(1), 186–205. <https://doi.org/10.24912/ja.v29i1.2762>
- Bahrien, M., & Purba, A. P. (2024). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(3).
- BAPENDA Sumatera Utara. (2021). *Persyaratan Pelayanan SAMSAT: Bus SAMSAT Keliling dan SAMSAT Gerai*. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. <https://bapenda.sumutprov.go.id/website/story/pelayanan-samsat/bus-samsat-keliling>
- Benedick, V., Musyaffi, A. M., & Pahala, I. (2024). *Pengaruh PKB, PPN, Iklan dan Harga Terhadap Minat Beli Kendaraan Listrik*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3).
- Dahrani, & Tyasti, H. A. (2024). *Influence Applicants Efficiency Taxation Variables Of Tax Payer 'S Behavior On E- Filling System On Reporting Individual Tax Payer Spt With Socialization As Proceeding 2 nd Medan International Ec. Proceeding Medan International Economics and Business Volume*, 2(1).
- Damanik, E. S. (2021). *Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>
- Enggaryanti, A. H. (2024). *E-Samsat and Motor Vehicle Taxpayer Compliance in The Perspective of Systematic Literature Review*. *Journal of Applied*

- Management and Business*, 5(2), 64–77.
<https://doi.org/10.37802/jamb.v5i2.922>
- Erna Listyaningsih, S. H. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *I(3)*, 164–177.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0*. Diponegoro University Press.
- Hafsah, & Dini Aprilia Pratiwi. (2022). Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Medan. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 492–507
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- Heliani. (2023). *Kepatuhan wajib pajak dari perspektif internal dan eksternal individu*. Deepublish.
- Hidayatussa'adah, R. F. (2025). Sistem Informasi Akuntansi: Pengertian, Komponen, Dan Pentingnya Dalam Perusahaan.
- Isnaini Husna, S.(2022). Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Rokan Hilir Riau Isnaini. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 2, 325–336.
- Khopipah, S. (2023). Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Atas Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Kia 10*, 1–13.
- Lubis, H. Z., & Sukoco, P. I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 583–589.
<https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25340>
- Machfiroh, I. S., & Mutholib, A. S. (2024). Pengaruh aspek internal dan eksternal wajib terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya (JMSA)*, 12(1).
<https://doi.org/10.24252/msa.v12i1.39575>
- Magadhendra, F., Soebagyo, D., & Hasmarini, M. I. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Defisit APBN Di Indonesia Tahun 2007-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1255–1260.

- Mais *et al.* (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 52. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1899>
- Murni Sulistyowati, N. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) Murni*. 24(02), 1–8.
- Ningsih, N. R., Marlina, L., & Fatmayanti. (2025). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(3), 675–685. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jrpi/article/view/33768/11373>
- Nisa, K., & Saepuloh, C. (2025). Pengaruh Penerapan Program E-Samsat dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bandung II Soreang. 11(3), 1284–1294.
- Nuraini, & Furqon, I. K. (2023). Memahami Efektivitas E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 5(1), 18–24.
- Oktavianingrum, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). 1(2), 244–252.
- Putri, D. H., & Lia, I. Y. A. (2025). *Transparency and Accountability of the Taxation System Towards Coretax Administration System. Journal of Finance and Business Digital*, 4(2), 525–544. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v4i2.230>
- Rahmawati, R., & Sutrisno, E. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.32834/jpap.v2i2.229>
- Ramadhian, A., & Maryono. (2025). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance at the West Semarang Primary Tax Service Office (Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(1)
- Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2024 (2025).
- Rindiyani, R., & Faisol, M. (2023). *Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*. 4, 1–15. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v4i1.1676>
- Rizky, I. A., & Rialdy, N.. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Jurnal Lentera Bisnis, 14(1), 548–559.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1283>

- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.). Pearson Education.
- Sari, I. N., Magfirah, Hamidah, O. P., & Musfiroh, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Jember: Studi Kualitatif Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.499>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatiningsih, Darwis, H., & Ramadhanti, P. (2023). Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 57–68.
- Supriyati. (2022). Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Tantangan Demokratisasi dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Riset*, 9(2), 59–72.
- Susanty, R., Hidayat, V. S., Studi, F. B., & Maranatha, A. K. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung) *Rini*. 9, 3376–3387.
- Triana Kusuma Dewi *et al.* (2023). *Konsep-Buku-Pedum-PDRD-Provinsi-Revisi.pdf* (p. 153).
- Utami, D. S. P., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 13–31. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52635>
- Wafqi, M., & Alghaviqi, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut). *15(2)*, 200–209.
- Wahyudi, A. (2021). Analisis Pengimplementasian Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 1(2808–0149), 1–14.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia* (Buku 1). Salemba Empat.

Zubaidah, E., & Fitri Lubis, E. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi E Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14 Nomor 2(2), 120–125

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Responden

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSAT Lubuk Pakam

Di Tempat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S-1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazwa Shayra Anataya

NPM : 2205170152

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Akuntabilitas Administrasi Perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT SAMSAT Lubuk Pakam.”** Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan objektif untuk keperluan penelitian.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian dalam bentuk apa pun. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Atas perhatian, waktu, dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 2026

Hormat Saya

Nazwa Shayra Anataya

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia :
4. Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Mahasiswa Lainnya

KETERANGAN SKALA JAWABAN

Gunakan skala berikut untuk menjawab seluruh pernyataan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanggapan atas setiap pernyataan sesuai dengan keadaan dan pengalaman yang sebenarnya.
2. Berikan tanda checklist (✓) pada salah satu kolom jawaban yang tersedia.
3. Tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL AKUNTABILITAS
ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X_i)**

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
	Transparansi Administrasi					
1	Informasi mengenai prosedur dan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersedia secara jelas dan terbuka bagi wajib pajak.					
2	Wajib pajak dapat dengan mudah mengetahui besaran pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan.					
	Kejelasan Dan Kepastioan Prosedur					
3	Alur pelayanan administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Lubuk Pakam sudah jelas dan tidak berbelit-belit.					
4	Prosedur administrasi perpajakan yang berlaku diterapkan secara konsisten kepada seluruh wajib pajak.					
	Tanggung Jawab Aparatur Pajak					
5	Petugas pajak di UPT Samsat Lubuk Pakam bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.					
6	Petugas pajak memberikan penjelasan yang memadai apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam proses administrasi.					
	Pertanggungjawaban pelaksanaan adminitrsasi pajak					
7	Setiap proses administrasi perpajakan di UPT Samsat Lubuk Pakam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
8	Wajib pajak mendapatkan bukti atau konfirmasi resmi atas setiap transaksi pembayaran pajak yang dilakukan.					

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI / E-SAMSAT (X₂)**

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
Kemudahan penggunaan sistem						
1	Layanan E-SAMSAT mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.					
2	Wajib pajak tidak membutuhkan keahlian khusus untuk menggunakan layanan E-SAMSAT.					
Keandalan Sistem						
3	Sistem E-SAMSAT beroperasi secara stabil dan jarang mengalami gangguan teknis saat digunakan.					
4	Layanan E-SAMSAT dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa hambatan yang berarti.					
Keakuratan Informasi Perpajakan						
5	Informasi mengenai besaran Pajak Kendaraan Bermotor yang ditampilkan E-SAMSAT sudah akurat dan sesuai kewajiban wajib pajak.					
6	Status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-SAMSAT diperbarui secara real-time dan tepat.					
Kecepatan dan Efisiensi Pelayanan						
7	Proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-SAMSAT lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran langsung ke kantor Samsat.					
8	Penggunaan E-SAMSAT mengurangi waktu dan prosedur sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri di kantor Samsat.					

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (Y)**

No.	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak						
1	Saya selalu membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebelum batas waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan.					
2	Saya tidak pernah menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hingga melewati tanggal jatuh tempo.					
Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Administrasi						
3	Saya selalu melengkapi dokumen dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.					
4	Saya mengikuti prosedur administrasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh UPT Samsat Lubuk Pakam.					
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perpajakan						
5	Saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan berusaha mematuhi.					
6	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai besaran yang telah ditetapkan tanpa mengurangi jumlah yang seharusnya.					
Kesadaran Wajib Pajak						
7	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas kesadaran sendiri sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.					
8	Saya menyadari bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi langsung pada pembangunan dan pelayanan publik di daerah.					

Ketepatan Pelaporan Data					
9	Saya memastikan data kendaraan yang saya laporkan sudah benar dan sesuai kondisi sebenarnya				
10	Saya menyimpan bukti pembayaran PKB sebagai dokumentasi pemenuhan kewajiban perpajakan.				

Tabulasi Data Instrument Penelitian

Variabel Akuntabilitas Administrasi Perpajakan (X1)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	5	5
2	4	3	4	4	3	4	4
4	4	5	4	5	4	5	5
4	5	4	4	4	5	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	3	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	3	3	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	5	3	4	5
4	3	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4
5	4	4	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	2
5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	5	5	3	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	5	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4	3
5	3	4	2	4	5	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	5	4	5
4	4	4	3	3	3	3	3
4	5	5	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	5	4	5	4	4

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
5	5	5	5	5	5	5	4
3	3	3	4	4	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	5	4	4
4	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4
1	1	1	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	3	5	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4
4	5	5	5	5	5	4	5
4	4	5	4	3	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	4
4	3	2	2	3	2	2	3
5	5	5	5	5	5	4	3
5	5	4	5	4	3	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5
1	2	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	5	3	2	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	3	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	3
4	5	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	5	5	2	4

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
4	5	4	4	5	5	5	4
3	5	5	4	5	4	5	4
5	5	4	5	4	4	5	5
4	3	5	4	3	4	3	5
5	3	4	4	4	4	5	4
5	4	5	5	5	5	5	5
1	3	2	3	3	2	2	4
5	5	4	4	3	5	5	3
1	2	3	3	4	3	3	2
5	5	4	3	4	3	4	4
4	5	4	3	4	4	4	4
4	5	4	3	4	5	3	2
4	3	4	4	4	3	4	4
2	3	4	4	4	4	3	4
4	3	4	4	4	3	4	4
4	5	4	5	4	3	4	5
2	2	2	2	2	3	2	1

Variabel Sisem Informasi Akuntansi (X2)

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	3	3	3	4
2	4	2	3	4	4	3	3
5	5	4	5	5	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	4	3	5	5	5	4
5	5	3	3	4	4	3	4
5	5	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	5	5	4
5	5	4	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	3	3	3
5	5	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	3	3	3	5	3	4
4	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	4	4	2	3	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	5	5	5
4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	4	4
5	5	4	5	4	5	4	4

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
5	5	5	5	4	5	5	5
3	4	2	2	2	2	3	3
5	5	4	4	4	4	3	4
5	5	5	4	4	4	5	4
2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5
4	5	4	4	5	5	4	5
2	2	2	1	1	2	2	2
4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	3	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	4	4	5
4	5	4	4	4	4	4	3
4	3	4	4	4	3	3	3
5	5	4	4	4	4	4	4
3	2	2	2	2	2	4	3
4	5	3	3	4	3	4	3
3	3	5	5	4	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	3	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	2	2	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	5	4	4	4	5	4

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
5	5	3	3	3	4	3	4
4	5	4	5	5	4	5	3
4	4	4	3	5	5	5	4
5	5	3	3	4	4	5	4
5	3	3	4	5	3	4	3
5	5	4	5	3	3	4	5
5	5	5	4	4	4	5	5
3	3	3	3	4	2	3	2
4	4	5	3	4	5	4	4
4	3	4	2	3	4	3	4
5	5	4	3	4	4	5	3
3	5	5	4	4	5	3	5
4	5	4	4	4	3	4	3
3	4	4	5	4	3	5	4
3	3	1	1	2	2	2	4
4	4	3	3	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5	4
2	2	2	2	1	3	3	1

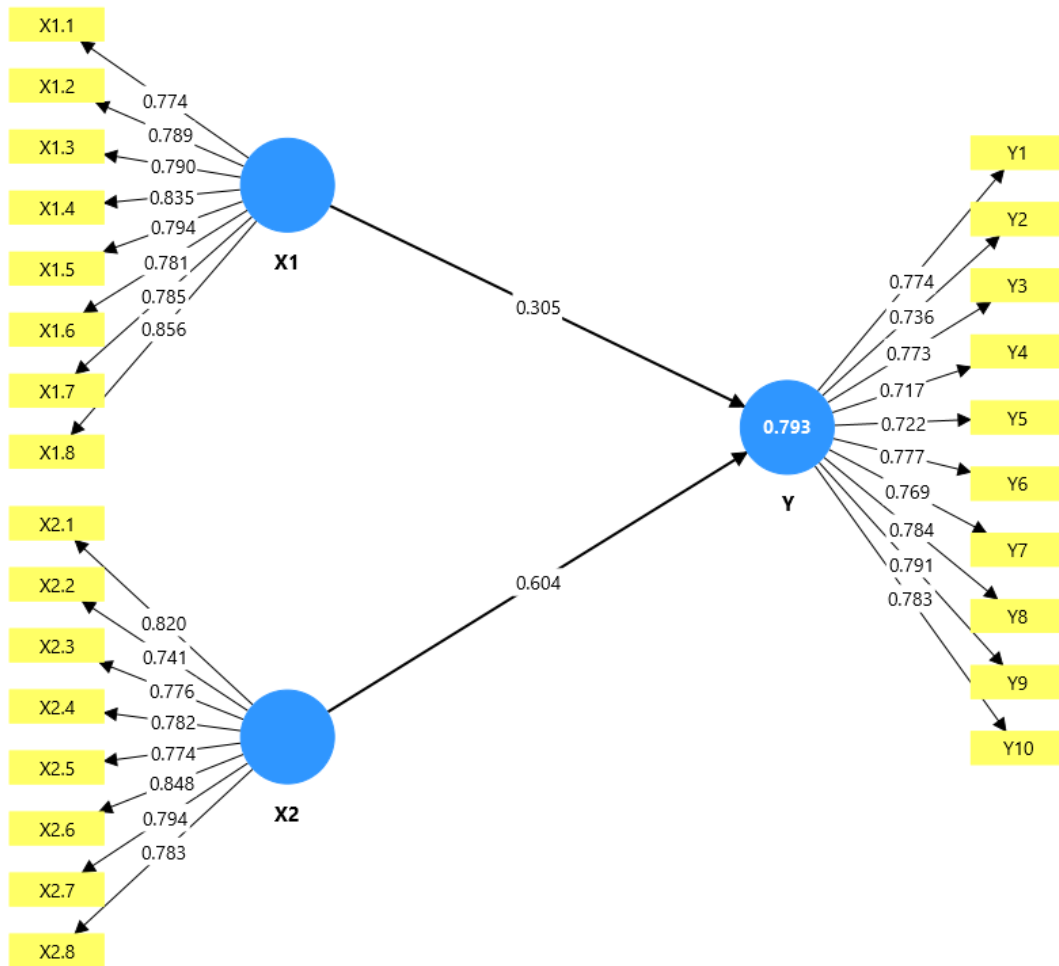
Variabel Kepatuhan Waib Pajak (Y)

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	3	4	5	5	5
4	4	4	3	3	2	4	3	4	4
3	4	5	5	5	4	4	5	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	2	2	2	1	2	1	1	1	1
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	4	3	3	4	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	3	4	3	4	4	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	4	4	5	4	5	4
4	5	4	2	3	3	4	3	5	3
5	4	4	4	4	5	5	5	5	4
4	4	5	5	4	4	4	4	5	5
4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
3	4	3	3	3	4	4	4	4	3
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	5	5	4	4	5
3	4	4	5	5	5	5	4	4	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	5	4	4	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
4	4	5	5	3	3	3	4	2	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	3	4	4	3	4	3	4	4
3	4	4	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	5	4	4	4	5
3	5	4	4	4	4	5	5	5	5

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
4	5	4	4	4	4	4	5	5	5
5	3	3	3	4	4	3	4	4	4
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
4	5	4	3	4	4	5	4	4	4
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	5	5	3	4	4	5	4	4	5
5	5	5	3	4	4	5	4	4	5
4	5	5	3	4	4	5	4	4	5
4	5	5	3	4	4	5	4	4	5
3	5	5	3	4	4	5	4	4	5
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
5	2	2	2	1	2	1	1	2	2
4	4	4	4	2	2	4	4	4	4
4	5	4	4	3	4	4	3	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
4	3	5	5	4	3	4	4	5	3
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
3	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	3	2	3	3	4	4	3	3	2
5	4	3	3	3	3	3	3	3	4
4	3	3	4	4	5	4	4	4	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	3	2	4	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	2	5	4	3	5	5
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	5	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	5	5	4	5	4	3	5	5
4	4	4	3	4	4	5	4	4	5
5	4	4	4	4	4	4	5	4	4

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
4	5	4	3	3	3	4	3	5	3
4	4	4	5	5	4	4	5	5	5
3	5	3	3	4	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
5	5	3	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	3	3	3	4	4	5	5
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
4	5	4	3	4	4	5	4	5	4
5	4	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	3	4	5
4	5	4	4	5	5	5	5	4	5
3	4	4	4	4	4	3	2	4	5
4	3	3	3	3	4	3	4	3	4
5	4	4	3	3	4	3	4	4	4
4	4	4	5	1	1	5	5	5	4
4	4	4	5	5	4	4	5	4	5
3	2	1	1	2	2	1	1	1	2

SKEMA OUTER MODEL



OUTER LOADING – MATRIX

	X1	X2	Y	
X1.1	0.774			
X1.2	0.789			
X1.3	0.790			
X1.4	0.835			
X1.5	0.794			
X1.6	0.781			
X1.7	0.785			
X1.8	0.856			
X2.1		0.820		
X2.2		0.741		
X2.3		0.776		
X2.4		0.782		
X2.5		0.774		
X2.6		0.848		
X2.7		0.794		
X2.8		0.783		
Y1			0.774	
Y10			0.783	
Y2			0.736	
Y3			0.773	
Y4			0.717	
Y5			0.722	
Y6			0.777	
Y7			0.769	
Y8			0.784	
Y9			0.791	

CONSTRUCT RELIABILITY AND VALIDITY

	Cronbach's alpha	Composite reliability (r...	Composite reliability (r...	Average variance extrac...
X1	0.920	0.922	0.935	0.642
X2	0.914	0.916	0.930	0.625
Y	0.920	0.921	0.933	0.582

DISCRIMINANT VALIDITY – CROSS LOADING

	X1	X2	Y
X1.1	0.774	0.683	0.636
X1.2	0.789	0.773	0.669
X1.3	0.790	0.709	0.675
X1.4	0.835	0.744	0.698
X1.5	0.794	0.689	0.636
X1.6	0.781	0.719	0.682
X1.7	0.785	0.702	0.680
X1.8	0.856	0.800	0.783
X2.1	0.732	0.820	0.689
X2.2	0.667	0.741	0.656
X2.3	0.660	0.776	0.686
X2.4	0.737	0.782	0.613
X2.5	0.712	0.774	0.682
X2.6	0.766	0.848	0.776
X2.7	0.729	0.794	0.702
X2.8	0.744	0.783	0.748
Y1	0.653	0.667	0.774
Y10	0.668	0.699	0.783
Y2	0.695	0.709	0.736
Y3	0.637	0.657	0.773
Y4	0.618	0.651	0.717
Y5	0.598	0.611	0.722
Y6	0.634	0.623	0.777
Y7	0.650	0.691	0.769
Y8	0.693	0.680	0.784
Y9	0.662	0.721	0.791

HASIL UJI S-SQUARE

	R-square	R -square adjusted
Y	0.793	0.788

HASIL UJI F – SQUARE

	X1	X2	Y
X1			0.078
X2			0.304
Y			

PATH COEFFICIENT- MEAN, STDEV, T-STATISTIC, P-VALUES

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (ST..)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 ->Y	0.305	0.311	0.123	2.485	0.013
X2 ->Y	0.604	0.600	0.116	5.201	0.000